

Pelatihan Pengelolaan Bumdes Di Negeri Larike Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah

Meidylisa Patty^{1*}, Audry Leiwakabessy², Leonardo Stevy Pariama³, Harry Anthony Pierre Sitaniapessy⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Ambon
Email: meidyps@gmail.com^{1*}

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk memberikan solusi bagi pengelolaan badan usaha milik negeri (BUMNeg) Larike yang telah berdiri selama 4 tahun namun unit bisnis yang dikelola hanya unit bisnis keuangan mikro BRILink. Pengurus BUMNeg mengalami kesulitan dalam merencanakan unit usaha baru padahal negeri Larike memiliki banyak potensi dan kebutuhan masyarakat yang dapat dikelola oleh BUMNeg. Solusi yang diberikan adalah berupa pelatihan penyusunan rencana model bisnis baru sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat negeri Larike serta akuntansi sederhana untuk mengelola unit bisnis yang terbentuk. Metode yang digunakan adalah metode perencanaan model bisnis canvas yang terdiri dari 9 blok elemen bisnis dan penyusunan model akuntansi sederhana berupa pencatatan transaksi harian, penyusunan laporan laba rugi dan neraca.

Keywords: Akuntansi, Badan Usaha Milik Desa, Model bisnis

PENDAHULUAN

Adanya perubahan sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik melalui dikeluarkannya UU No. 22/1999 dan telah direvisi menjadi UU No. 32/2004, kemudian diganti dengan UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan desentralisasi selain mengurangi beban dan tanggung jawab pemerintah pusat dengan memberikan sebagian kewenangan ke daerah, namun juga harapannya dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan pelayanan publik (Kyriacou dan Sagales, 2011; Syurmita, 2014; Maria et al, 2020). Dalam perjalanan pertumbuhan pembangunan, pemerintah desa sebagai bagian dari pemerintah daerah kemudian diberikan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat dengan dikeluarkannya UU No. 6 tahun 2014. Salah satu bentuk pembangunan penguatan ekonomi yang diamanatkan dalam Bab 10 pasal 87, UU No 6 Tahun 2014 adalah pembentukan badan usaha milik desa (BUMDesa). Sebagai lembaga penguat perekonomian desa, berdirinya suatu BUMDesa perlu memperhatikan aspek kelembagaan sebagai suatu entitas/organisasi, perencanaan usaha, pelaporan keuangan dan aspek pengembangan usaha.

BUMDesa di Indonesia bergerak pada usaha bisnis sosial seperti air bersih, listrik dan sampah; usaha bisnis persewaan; perdagangan pertanian, perkebunan, sembako; unit usaha keuangan seperti simpan pinjam, keuangan mikro, agen perbankan; unit usaha jasa perantara seperti bengkel, fotocopy, penjualan tiket; dan unit usaha pariwisata. Data Kementerian Desa

tahun 2022 menunjukkan jumlah BUMDesa di Indonesia mencapai 57.237. Terdapat 12.040 BUMDesa yang tidak aktif disebabkan oleh banyak faktor, antara lain rendahnya kreatifitas dan inovasi dalam mengelola potensi desa menjadi produk/jasa yang bernilai jual atau ekonomis, BumDes belum membuat perencanaan usaha, serta rendahnya SDM pengurus BumDes dalam melakukan tata kelola administrasi dan keuangan,

Negeri Larike, salah satu desa adat di Pulau Ambon yang merupakan bagian dari Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah telah memiliki BUMDesa yang telah didirikan 4 tahun yang lalu. BUMDesa atau BUMNeg Larike telah menjalankan usaha simpan pinjam dan keuangan mikro (BRILink) namun pengelolaannya belum optimal. Dari hasil wawancara di lapangan, pengurus BUMNeg Larike, kurang memiliki pemahaman mengenai kelembagaan BUMDes dan perlu untuk diberikan pengetahuan dan pendampingan mengenai cara membentuk model bisnis sesuai dengan potensi dan kebutuhan negeri Larike. Negeri Larike, memiliki potensi unggulan berupa hasil perkebunan kelapa (kopra), cengkeh, dan pala. Terdapat juga potensi pariwisata berupa pantai Batu Layar, Sungai dengan Belut Raksasa (Morea) dan kuliner Roti Kering, yang belum dikelola dengan baik.

Pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan pengetahuan dan pelatihan mengenai penyusunan rencana unit bisnis dan akuntansi bagi unit bisnis yang telah disusun. Pelatihan penyusunan rencana model bisnis dilakukan dengan menggunakan metode canvas atau 9 buildingblock (Suryanto.R, 2018; Ostelwalder.A et all, 2010). IPTEK yang juga akan diterapkan yakni melatih cara menyelenggarakan sistem akuntansi sederhana dengan penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) sesuai dengan bentuk entitas BUMNeg yang masih dikategorikan EMKM dari jumlah modal yang dikelola. Manfaat yang diharapkan diperoleh oleh Pengurus BUMNeg, memiliki pemahaman dan pengetahuan praktis yang dapat diterapkan secara berkelanjutan pengelolaan BUMNeg sehingga BUMNeg Negeri Larike dapat kembali aktif, mandiri dan dapat menghasilkan pendapatan bagi Negeri Larike.

METODE KEGIATAN

Tahapan realisasi pemecahan masalah yang diberikan kepada Mitra melalui penerapan IPTEK dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengumpulan data profil negeri, mengalami kendala karena negeri Larike belum memiliki data profil yang cukup baik. Namun, Tim pengabdian bergerak dengan data pengalaman pendirian Bumneg Larike pada 3 tahun lalu dan informasi hasil wawancara, diskusi dan pengamatan lapangan.

2. Proses wawancara, diskusi dan pengamatan lapangan. Wawancara dilakukan kepada Bpk Raja Negeri Larike sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Larike, salah satu pengurus BUMNeg Larike yakni Bendahara BUMNeg dan beberapa Warga Negeri Larike yang memiliki usaha.
3. Penetapan jenis usaha yang dapat dikembangkan yakni Usaha Kuliner yang dijalankan oleh ibu-ibu warga negeri Larike dan Jasa Agen BRILink yang dijalankan oleh BUMNeg Larike.
4. Pelatihan Penyusunan Rencana Model Bisnis dari Jenis usaha tersebut, disusun dengan menggunakan Model Bisnis Canvas 9 Blok (Suryanto.R, 2018; Ostelwalder.A et all, 2010)
5. Pelatihan penyusunan akuntansi sederhana untuk sebuah unit bisnis sesuai jenis usaha menggunakan sistem akuntansi sederhana.

Metode pelaksanaan berupa metode pembelajaran orang dewasa, yaitu:

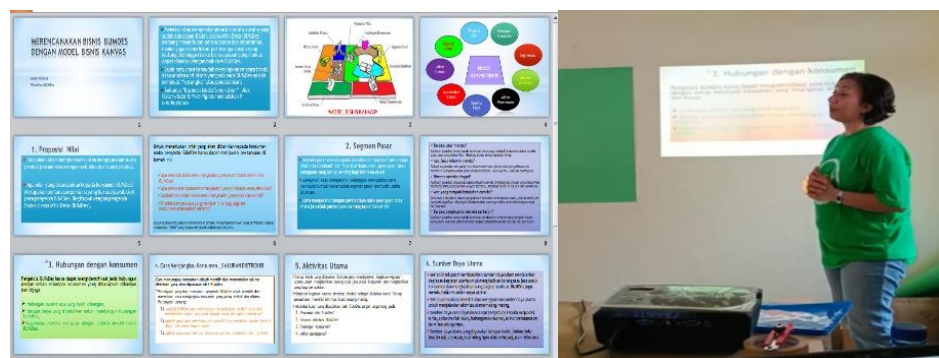
1. Ceramah, pendekatan ini dilakukan untuk memberi pengetahuan bukan saja mengenai penyusunan rencana model bisnis dan akuntansi sederhana namun juga pengetahuan mengenai badan usaha milik desa dan perkembangannya di Indonesia.
2. Diskusi, pendekatan ini dilakukan dengan mendapatkan umpan balik tentang pengetahuan yang diterima khalayak sasaran.
3. Praktek, khalayak sasaran dibagi dalam kelompok usaha yang dijalankan dan diberikan tugas untuk menyusun rencana model bisnis, dan praktik akuntansi sederhana kemudian diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil tugas yang diberikan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari Informasi awal yang kami dapatkan, badan usaha milik negeri (BUMNeg) Larike telah berdiri sejak 3 tahun yang lalu, awalnya bergerak di bidang simpan pinjam. Namun memasuki tahun pandemi covid, jenis bisnis tersebut mati suri dan ditinggalkan oleh pengurus sebelumnya. Saat ini yang modal yang ada masih diputar oleh bendahara BUMNeg dengan menjalankan Bisnis Finansial – BRILINK, yang antara lain menangani transfer uang kas tunai, penarikan kas, penjualan pulsa listik dan handphone di 80ersama8080t negeri Larike. Keadaan bumneg Larike ini menunjukkan bahwa pengurus Bumneg ataupun warga negeri Larike belum mengeksplorasi secara maksimal potensi yang ada di daerahnya untuk dapat dijadikan komoditi atau produk yang dapat dikembangkan ataupun untuk dipasarkan dan dijual.

Kegiatan ini dilakukan dalam 2 (Dua) tahapan. Tahapan pertama adalah perencanaan model bisnis/unit bisnis yang menggunakan model bisnis Canvas. Model bisnis Canvas ini dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dkk (2010) dalam buku *business model generation* (Gambar 2). Metode ini menggunakan 9 blok dalam model bisnis canvas dalam Gambar 2

antara lain: 1) Target Pasar (*Customer Segment*), untuk mulai merencanakan bisnis adalah dengan bertanya siapakah konsumen yang akan dijangkau bisnis tersebut (Suryanto, 2018); 2) Proposisi Nilai (*Proposition Value*), Blok ini berisikan keunikan dan keunggulan nilai yang ditawarkan unit bisnis bagi Konsumen yang kemudian menjadikan 81ersama konsumen memilih akan mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk/ jasa usaha kita. 3) Saluran Distribusi (*Distribution Chanel*), unit bisnis perlu menetapkan sejak awal saluran distribusi dan media seperti apa yang digunakan untuk menyampaikan mengenai pesan dari produk atau layanan jasa yang dijual; 4) Hubungan Konsumen (*Customer Relationship*), setelah memiliki chanel atau saluran distribusi untuk menjangkau konsumen, maka diperlukan kemampuan untuk menjaga hubungan baik dengan konsumen; 5) Aliran Pendapatan (*Revenue Stream*), BUMNeg/Unit Bisnisnya perlu sejak awal menentukan jenis – jenis pendapatan yang akan diperolehnya. 6) Aktivitas Utama (*Key Activities*), aktivitas kunci yang dibutuhkan oleh BUMNeg/Unit Bisnis sangat terganggu pada: Proposisi nilai; Saluran distribusi BUMDes; Hubungan konsumen; dan Aliran pendapatan.; 7) Sumber Daya Utama (*Key Resource*), sumber daya dalam menjalankan kegiatan-kegiatan utama untuk menghasilkan barang atau jasa untuk konsumen dan menghasilkan uang bagi usahanya. 8) Kerja sama (*Key Partnership*), agar sukses dalam harus bekerjasama dengan banyak pihak lainnya. Oleh karenanya tentukan dari awal apakah bisnis memerlukan investor untuk permodalan atau tidak. 9) Struktur Biaya (*Cost Structure*), seluruh aktivitas yang dilakukan memerlukan biaya, maka perlu dilakukan perhitungan secara seksama, lalu putuskan apakah rencana-rencana bisnis BUMDes menguntungkan? Mengetahui menguntungkan atau tidak, dengan memastikan bahwa penghasilan BUMNeg/Unit bisnis lebih besar dari pengeluaran. Jika tidak berarti bisnis akan merugi dan bisnis ini tidak layak dijalankan atau dikembangkan.



Gambar 1. Penyajian materi bisnis model canva

Setelah penyampaian materi dilanjutkan dengan diskusi dan praktek penyusunan model bisnis (Gbr 2). Peserta dibagi atas 4 kelompok usaha, berdasarkan kemiripan usahanya yakni,

Jajanan, roti kering, Bakso dan Gorengan. Peserta kemudian diminta bekerja secara kelompok untuk 82ersama82 unit usaha sesuai 9 Blok yang telah dipelajari. Hasil mereka kemudian didipresentasikan, dan didiskusikan 82ersama.



Gambar 2. Pelatihan penyusunan bisnis modelanva

Tahapan pelatihan kedua, tentang sistem akuntansi sederhana (Gambar 3). Materi terdiri dari Pencatatan arus kas masuk, keluar dan saldo kas. Kemudian dilanjutkan dengan buku persediaan, buku inventaris, laporan laba rugi dan neraca. Materi ini disajikan dengan contoh soal transaksi dengan jenis usaha kuliner dan peserta diajarkan mengisi pencatatan arus masuk dan keluar kas usaha, mencatat persediaan barang, mencatat buku inventaris, laporan laba rugi dan neraca. Peserta diberikan contoh kasus untuk dikerjakan dan dibahas dalam diskusi.



Gambar 3. Penyajian materi akuntansi sederhana untuk unit bisnis

Dalam kedua tahapan pelatihan, peserta sangat antusias mengikutinya. Hal ini terbukti dengan keaktifan peserta dalam praktek penyusunan model bisnis dan akuntansi sesuai usaha yang telah mereka jalani. Peserta juga sangat aktif dalam sesi tanya jawab dan diskusi saat mempresentasikan hasil kerja mereka.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat pelatihan penyusunan model bisnis dan akuntansi di Badan Usaha Negeri Larike telah selesai dilaksanakan. Pelatihan diikuti oleh pengurus BUMNeg dan ibu-ibu warga masyarakat yang usahanya bergerak di bidang kuliner. Dalam pelatihan ini, direncanakan menjadi salah satu unit bisnis yang akan dikembangkan oleh BUMNeg. Materi yang disampaikan adalah penyusunan model bisnis dengan metode bisnis Canva yakni merencanakan bisnis dengan menggunakan 9 blok pondasi bisnis dan akuntansi unit bisnis berupa cara mencatat arus kas masuk dan keluar; buku inventaris; buku persediaan; menyajikan laporan keuangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Pemerintah dan Masyarakat Negeri Larike, Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah yang telah memfasilitasi dan mendukung sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntan Indonesia (2018) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta <https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/Tentang%20SAK%20EMKM#gsc.tab=0>
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, (2017), Bahan Ajar Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA), Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi
- Kyriacou, A. P., & Sagales, O. R. (2011) *Fiscal Decentralization and Government Quality in the OECD*. *Economics Letters*, 111, 191–193. <https://ideas.repec.org/a/eee/econl/v111y2011i3p191-193.html>.
- Maria, E. & Halim, A (2020) Implementasi Kebijakan desentralisasi dan korupsi kepala daerah di Indonesia, Isu Kontemporer akuntansi publik, 21-36, Unitomo Press, Surabaya
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Indonesia
- Suryanto, R (2018) Peta Jalan BUM DESA Sukses, PT Syncore Indonesia, Yogyakarta
- Syurmita, (2014) Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Prediksi Financial Distress, In Konferensi Regional Akuntansi (pp. 1–28), Surabaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja